

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (Sebuah Model Implementasi Program Pengembangan Fungsi Kartu Identitas Anak di Kota Sibolga)

Ismar Rosidi¹, Warjio², Susanti³

Universitas Terbuka, Indonesia^{1,3}

Universitas Sumatera Utara, Indonesia²

Email: ismarrosidi.ir@gmail.com¹, warjio1974@gmail.com², susanti@ecampus.ut.ac.id³

Abstrak

Sejak diimplementasikan tahun 2017, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Sibolga masih sebesar 65,93% jauh di bawah kepemilikan akta kelahiran yang telah mencapai 99,72% di tahun 2023. Mitra kerja sama dalam pemanfaatan fungsi KIA, juga masih minim tercatat baru 5 mitra dan implementasinya pun belum optimal. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menganalisis dimensi-dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan KIA serta mengkonstruksi model implementasi program pengembangan fungsi KIA yang ideal agar pemanfaatannya optimal. Teori Grindle (1980) terkait variabel Isi Kebijakan (content of policy), Konteks Implementasi (context of implementation) dan dimensi-dimensi yang mempengaruhinya digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIA belum berdampak luas, karena dimensi jenis manfaat dari kebijakan KIA belum banyak dirasakan oleh masyarakat. Belum terlihat perubahan yang terjadi terhadap peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak anak. Demikian juga respon masyarakat dan para penyelenggara pelayanan publik terhadap kebijakan KIA masih lemah. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan fungsi KIA, direkomendasikan Model RING (Resources, Innovation, Network Interaction, and Goals) Implementasi Program Pengembangan Fungsi KIA di Kota Sibolga. Disarankan kepada implementor agar memperluas kemitraan KIA dan menyusun peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pemanfaatan KIA di Kota Sibolga.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Model RING, Kartu Identitas Anak

Abstract

Since its implementation in 2017, the ownership of Child Identity Card in Sibolga City has only reached 65.93%, significantly lower than the 99.72% ownership of birth certificates in 2023. Collaborative partners for utilizing Child Identity Card functions are also limited, with only five partners recorded, and its implementation has not been optimal. This study aims to describe and analyze the dimensions influencing Child Identity Card policy implementation and to construct an ideal model for implementing Child Identity Card function development programs to ensure optimal utilization. Grindle's (1980) theory regarding the variables of Policy Content, Context of Implementation, and their influencing dimensions is used to analyze the research issues. This study employs a qualitative method, collecting data through interviews, observations, and documentation. The research results indicate that the Child Identity Card policy implementation has not had a wide impact, as the benefits of the Child Identity Card policy have not been widely felt by the community. There has been no visible change in the improvement of public services and the fulfillment of children's rights. Likewise, the response from the community and public service providers regarding the Child

Analisis Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Sebuah Model Implementasi Program Pengembangan Fungsi Kartu Identitas Anak di Kota Sibolga)

Identity Card policy remains weak. To optimize the utilization of Child Identity Card functions, it is recommended to adopt the RING Model (Resources, Innovation, Network Interaction, and Goals) for implementing Child Identity Card function development programs in Sibolga City. It is suggested that implementers expand Child Identity Card partnerships and establish regional regulations governing the utilization of Child Identity Card in Sibolga City

Keywords: Policy Implementation, RING Model, Child Identity Card

Pendahuluan

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kebijakan baru pemerintah di bidang administrasi kependudukan. Disebut sebagai kebijakan baru karena secara eksplisit jenis dokumen KIA tidak ada tercantum dalam undang-undang administrasi kependudukan, tetapi kemudian diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Oleh karena kebijakan KIA sudah dikodifikasi dan disahkan secara formal dalam keputusan-keputusan pemerintah, maka telah dapat diimplementasikan karena sudah berlaku secara resmi (Nugroho, 2023).

Kebijakan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan anak, peningkatan pelayanan publik, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah didorong melaksanakan program mengembangkan fungsi KIA berbasis kemitraan dengan *stakeholder* terkait, namun belum semua daerah melaksanakan program tersebut. Berdasarkan Renstra Ditjen Dukcapil Kemendagri tahun 2020-2024 diketahui bahwa program pemanfaatan KIA dalam pelayanan publik dilakukan secara bertahap di setiap kabupaten/kota. Tabel 1 menunjukkan akumulasi target pelaksanaan program pemanfaatan KIA masih 200 kabupaten/kota atau 38,91% dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Tabel 1. Target Kabupaten/Kota Melaksanakan Pemanfaatan KIA dalam Pelayanan Publik

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah daerah yang memanfaatkan KIA dalam pelayanan publik kepada anak	20 kab/kota	30 kab/kota	40 kab/kota	50 kab/kota	60 kab/kota

Sumber: Renstra Ditjen Dukcapil Kemendagri 2020-2024

Selain pelaksanaan program pemanfaatan KIA yang masih minim, ternyata implementasi kebijakan KIA di berbagai daerah juga belum berjalan secara optimal. Beragam faktor penyebab tidak optimalnya implementasi kebijakan KIA, seperti di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, implementasi KIA terkendala ketersediaan sumber daya manusia dan sarana pendukung, sosialisasi yang belum merata, serta partisipasi orang tua anak masih rendah untuk kepemilikan kartu identitas anak (Tumbel et al., 2023). Terkait hal ini perlu dukungan kolaborasi yang baik antar *stakeholders* yang terlibat (Arkanuddin & Broto, 2023; Asriana & Susanti, 2022; Purnomo, 2022). Implementasi kebijakan KIA juga menghadapi kendala pada dimensi komunikasi, aspek kejelasan informasi, aspek konsistensi, dan dimensi disposisi (Ayanlia, 2014; Hamidah & Nazriah, 2023; Noer, 2021; Riana et al., 2023; Septa, 2023; Syaprianto, 2023; Ulum & Astrika, 2019). Program pengembangan fungsi KIA juga masih menghadapi kendala di beberapa daerah. Minimnya partisipasi dari kelompok sasaran kebijakan KIA menjadi

salah satu penyumbang belum optimalnya implementasi program pemanfaatan KIA di Kabupaten Serang, Provinsi Banten (Setyawan et al., 2024).

Implementasi kebijakan KIA di Kota Sibolga juga mengalami kondisi yang hampir sama. Berdasarkan data tahun 2023, tingkat kepemilikan KIA di Kota Sibolga masih sebesar 65,93%, jauh di bawah kepemilikan akta kelahiran yang telah mencapai 99,72% sebagaimana pada Tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Kepemilikan KIA dan Akta Kelahiran berdasarkan Kecamatan di Kota Sibolga Tahun 2023

Kecamatan	Anak 0-17 Thn	Memiliki KIA	% KIA	Memiliki Akta Lahir	% Akta Lahir
Sibolga Utara	6.292	3.922	62,33	6.277	99,77
Sibolga Kota	4.613	3.248	70,41	4.596	99,63
Sibolga Selatan	10.985	7.135	64,95	10.955	99,73
Sibolga Sambas	6.379	4.333	67,93	6.362	99,73
Jumlah	28.269	18.638	65,93	28.190	99,72

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

Begitu juga dengan program pengembangan fungsi KIA yang telah menggandeng 5 mitra, implementasinya belum berjalan optimal. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara komprehensif sejauh mana kebijakan KIA diimplementasikan di Kota Sibolga dengan menganalisis dimensi-dimensi yang mempengaruhi implementasinya menggunakan teori Grindle (1980) dan merekomendasikan sebuah model implementasi program pengembangan fungsi KIA di Kota Sibolga. Implementasi kebijakan publik merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Grindle, 2017). Program pengembangan fungsi KIA merupakan penjabaran dari kebijakan KIA untuk meningkatkan pemanfaatan KIA dalam pelayanan publik. Implementasi kebijakan yang dijabarkan ke dalam program akan membantu mempercepat tercapainya tujuan kebijakan sehingga memberikan manfaat nyata yang berdampak luas kepada masyarakat.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan dimensi-dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan KIA kemudian mengkonstruksi sebuah model implementasi program pengembangan fungsi KIA yang ideal sebagai rekomendasi agar pemanfaatan KIA berjalan optimal di Kota Sibolga. Analisis implementasi menggunakan teori (Grindle, 2017) yang terdiri dari variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel konteks implementasi (*context of implementation*).

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang disajikan secara eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan pemilihan dan penetapan informan menggunakan teknik purposive yaitu metode yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa informan yang telah ditetapkan memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup dan kredibilitas atau dianggap mengetahui atau yang terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut (Malo et al., 2022; Wijaya, 2018) melalui tiga tahap, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Sibolga

Implementasi kebijakan KIA di Kota Sibolga dianalisis berdasarkan teori implementasi model Merilee S. Grindle (1980) yang dipengaruhi oleh dua variabel yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasinya (*context of implementation*), diuraikan sebagai berikut:

Isi kebijakan (*content of policy*)

Terdapat 6 dimensi yang mempengaruhi variabel isi kebijakan dalam implementasi KIA di Kota Sibolga yaitu sebagai berikut:

1. Kepentingan yang dipengaruhi

Kepentingan yang dipengaruhi kebijakan KIA menyangkut aspek pendataan anak, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Jika dicermati, aspek peningkatan kualitas pelayanan publik dan perlindungan hak-hak anak relatif cukup luas untuk dapat dipengaruhi oleh kebijakan KIA karena kedua aspek tersebut bukan hanya menyangkut kepentingan internal implementor saja tetapi lebih luas lagi kepada kepentingan eksternal. Oleh karena menyangkut kepentingan yang lebih luas maka secara konsep diperlukan waktu yang relatif lama untuk dapat mempengaruhinya. Berbeda dengan aspek peningkatan pendataan anak yang dapat langsung diintervensi pencapaiannya karena secara internal merupakan bagian tugas dan fungsi implementor.

2. Jenis manfaat

Pemanfaatan fungsi KIA masih tergolong minim digunakan dalam berbagai pelayanan publik, sehingga belum banyak masyarakat merasakan manfaat KIA. Ada beberapa sektor yang telah menggunakan KIA dalam sistem layanan, seperti pada sektor pendidikan dan kesehatan, namun kedua sektor tersebut belum secara maksimal menggunakan KIA dalam sistem layanannya. Adanya manfaat langsung (*direct benefits*) dan keluasan cakupan manfaat yang dirasakan masyarakat berperan penting terhadap keberhasilan implementasi KIA.

3. Jangkauan perubahan yang ingin dicapai

Kebijakan KIA telah berkontribusi terhadap peningkatan pendataan anak ke dalam database kependudukan nasional, begitu juga dalam keberhasilan Kota Sibolga dalam meraih predikat sebagai Kota Layak Anak sejak tahun 2020-2023. Namun perubahan pada peningkatan pelayanan publik dan perlindungan anak belum begitu nyata terlihat. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan perlindungan anak bukan hanya menjadi tugas dari implementor KIA, tetapi merupakan tanggung jawab lintas sektoral sehingga dapat dikategorikan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin dicapai kebijakan KIA.

4. Letak pengambilan keputusan

Kebijakan KIA sudah sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun keputusan-keputusan yang diambil di tingkat daerah. Peraturan dan regulasi kebijakan di tingkat pusat dianggap telah mencukupi untuk mendukung kebijakan KIA, namun di tingkat daerah belum tersedia peraturan kepala daerah mengenai pengaturan manfaat KIA. Pengambilan keputusan dalam tatanan pemerintahan berbasis otonomi daerah selalu bersifat hierarkis dari pusat sampai daerah. Oleh karena itu keberhasilan implementasi kebijakan KIA harus mendapat dukungan dari berbagai segmen pemerintahan.

5. Pelaksana program

Implementor dalam melaksanakan implementasi KIA didukung oleh sistem koordinasi yang terjalin baik antara unit-unit penyelenggara serta sistem kerja yang

mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan. Namun pelaksanaan program pengembangan fungsi KIA yang berkaitan dengan pihak eksternal harus dilaksanakan secara kolaboratif. Implementasi kebijakan KIA tidak hanya didukung oleh pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel, tetapi juga harus memiliki komitmen untuk mencapai tujuan kebijakan KIA.

6. Sumber daya yang dikerahkan

Sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan KIA dapat dikategorikan sudah cukup memadai, baik dilihat dari sumber daya pelaksana, maupun fasilitas sarana dan prasarana pendukung. Namun dari sisi dukungan anggaran kebijakan KIA belum sepenuhnya maksimal setidaknya dalam dua tahun terakhir.

7. Konteks implementasi (*context of implementation*)

Konteks implementasi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan KIA di Kota Siboga berdasarkan teori Grindle mencakup tiga dimensi sebagai berikut:

8. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Proses implementasi KIA telah mengakomodir strategi dan melaksanakan instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Kebijakan KIA juga telah mendapat dukungan dari lembaga legislatif sebagai mitra eksekutif mulai dari perencanaan, penganggaran sampai kepada pengawasan kegiatan.

9. Karakteristik lembaga dan penguasa

Implementor KIA telah menggalakkan program-program inovatif untuk mendukung keberhasilan pengembangan fungsi KIA. Pembangunan karakter inovatif menjadi modal penting untuk mencapai tujuan suatu kebijakan KIA. Membangun karakter lembaga yang positif merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan kesadaran dan komitmen yang tinggi dari implementor kebijakan.

10. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap implementor kebijakan KIA sudah baik, namun respon terhadap program dari para *stakeholders* dan masyarakat masih tergolong lemah. Kepatuhan dan daya tanggap tidak hanya harus dimiliki oleh implementor tetapi juga oleh kelompok sasaran kebijakan. Kepatuhan dan daya tanggap berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan KIA.

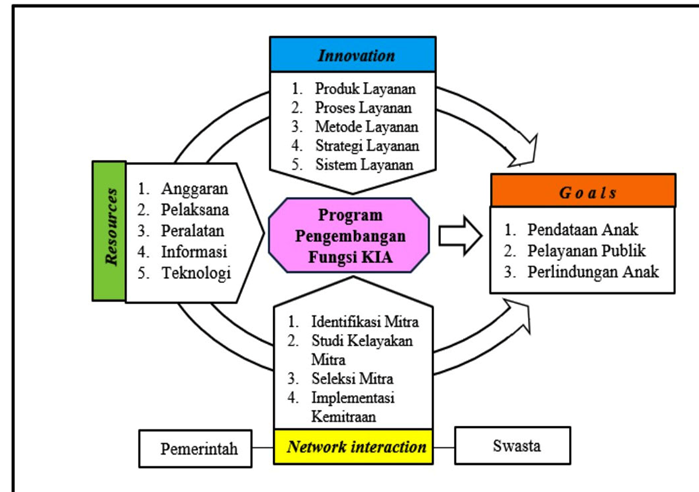
Selain dimensi-dimensi implementasi di atas, peneliti juga menemukan dimensi interaksi jejaring kerja (*network interaction*) yang tidak terdapat dalam teori Grindle tetapi ada dalam teori Muchlis Hamdi. Dimensi tersebut berkaitan dengan kerja sama antar pelaksana dan hubungan wewenang antar tingkatan pemerintahan. Namun dimensi jejaring kerja identik dengan dimensi letak pengambilan keputusan, pelaksana program, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor, dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap yang terlibat pada teori Grindle. Dimensi *network interaction* relevan dengan implementasi kebijakan KIA karena program pemanfaatan fungsi KIA didesain melalui kemitraan yang melibatkan berbagai *stakeholder* baik pemerintah maupun swasta.

Model Implementasi Program Pengembangan Fungsi KIA

Program pengembangan fungsi KIA merupakan penjabaran dari kebijakan Kartu Identitas Anak untuk mencapai tujuan kebijakan terutama pemanfaatan KIA dalam pelayanan publik kepada anak di Kota Sibolga. Untuk mengoptimalkan program pengembangan fungsi KIA, peneliti merekomendasikan Model RING (*Resources, Innovation, Network interaction, and Goals*) Implementasi Program Pengembangan

Analisis Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Sebuah Model Implementasi Program Pengembangan Fungsi Kartu Identitas Anak di Kota Sibolga)

Fungsi KIA di Kota Sibolga. Model ini merupakan hasil analisis dari dimensi-dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan KIA menurut teori (Grindle, 2017) dan dari temuan-temuan penelitian yang dielaborasi untuk membuat model penelitian baru sebagaimana pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Model RING Implementasi Program Pengembangan Fungsi KIA

Model RING terdiri dari tiga dimensi yang mengintervensi program pengembangan fungsi KIA, yaitu *Resource*, *Innovation*, dan *Network interaction* serta satu dimensi yang diintervensi, yaitu *Goals*, diuraikan sebagai berikut

Resources (sumber daya)

Sumber daya adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pengembangan fungsi KIA di Kota Sibolga. Komponen sumber daya mengacu kepada indikator sumber daya determinan implementasi kebijakan publik model (Hamdi, 2014) yang terdiri dari:

1. Kecukupan anggaran

Anggaran yang cukup menjadi modal utama dalam menjalankan sebuah program yang berfungsi sebagai acuan rencana kerja maupun pengambilan keputusan, meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasi dalam program pengembangan fungsi KIA.

2. Ketersediaan pelaksana

Sumber daya yang dibutuhkan tidak hanya kompeten dan kapabel, tetapi juga memiliki komitmen yang tinggi untuk memberhasilkan program pengembangan fungsi KIA. Ketersediaan pelaksana didukung oleh sistem pembagian kerja serta garis koordinasi yang jelas antar unit-unit pelaksana pelayanan, sistem kerja pelaksana mengacu Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Standar Pelayanan (SP).

3. Kecukupan peralatan

Ketersediaan peralatan atau fasilitas pendukung pelayanan KIA yang harus disediakan, meliputi: ruang pelayanan, perangkat komputer dan jaringan SIAK, peralatan cetak dan rekam KIA, blangko KIA dan lain sebagainya.

4. Ketersediaan informasi

Ketersediaan data dan informasi layanan dan pengembangan fungsi KIA yang dapat diakses masyarakat secara manual atau digital, meliputi: billboard; banner; spanduk; baliho; brosur/leaflet, *website*, media sosial, dan informasi komponen dalam standar pelayanan publik.

5. Ketepatan teknologi

Ketepatan teknologi merupakan teknologi pendukung kebijakan KIA yang mudah diakses oleh masyarakat dalam pengurusan KIA, meliputi: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat; aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan aplikasi Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Online Cepat dan Nyaman (SIPONCAN) yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.

Innovation (inovasi)

Inovasi pada pelayanan KIA dilakukan secara inkremental bertahap dan terus-menerus terhadap 5 aspek layanan (Muluk, 2008), sebagai berikut:

1. Inovasi produk layanan

Inovasi produk layanan KIA dapat dilakukan pada perubahan desain kartu melalui penambahan *chip* dan KIA dalam bentuk digital. Namun kebijakan ini memerlukan dukungan dan komitmen dari pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan KIA. Selain perubahan pada desain, inovasi produk KIA juga dapat dilakukan dengan penguatan fungsinya, seperti sebagai alat pembayaran non tunai, kartu diskon, membuka tabungannya.

2. Inovasi proses layanan

Inovasi pada aspek proses ini adalah pembaharuan kualitas yang berkelanjutan yang dapat ditetapkan dengan melakukan perubahan mekanisme prosedur layanan dalam SOP, perubahan kualitas layanan dalam Standar Pelayanan, serta penetapan target program berkelanjutan dalam dokumen keputusan dan perencanaan program pengembangan fungsi KIA, termasuk peraturan kepala daerah yang mengatur pemanfaatan KIA dalam pelayanan publik.

3. Inovasi metode layanan

Metode layanan yang dikembangkan adalah dalam bentuk layanan online atau digital menggunakan aplikasi Siponcan (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Online Cepat dan Nyaman) yang dapat diakses melalui smartphone berbasis android untuk mengurus KIA dan dokumen kependudukan lainnya.

4. Inovasi strategi layanan

Inovasi dilakukan menyangkut aspek perubahan visi, misi, tujuan dan strategi baru dalam mengoptimalkan pemanfaatan fungsi KIA dengan mengadopsi strategi pengembangan fungsi KIA yang telah berhasil dilakukan oleh daerah lain.

5. Inovasi sistem layanan

Sistem layanan KIA dirancang terintegrasi dengan beberapa inovasi layanan kependudukan lainnya yang telah dikembangkan. Selain itu dikembangkan sistem layanan data KIA berbasis NIK yang terintegrasi dengan mitra, sehingga data balikan pemanfaatan KIA terintegrasi dalam satu sistem layanan.

Network interaction (interaksi jejaring kerja)

Langkah strategi untuk memaksimalkan pemanfaatan fungsi KIA adalah memperluas kemitraan dengan instansi pemerintah maupun swasta dengan melakukan tahapan kemitraan KIA (ESCAP, 2011), sebagai berikut:

1. Identifikasi pemilihan mitra

Mengidentifikasi instansi pemerintah dan swasta yang potensial untuk diajak menjalin kerja sama kemitraan pemanfaatan fungsi KIA, mencakup: fasilitas kesehatan; fasilitas pendidikan; fasilitas olah raga; fasilitas hiburan; pengelola tempat

Analisis Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Sebuah Model Implementasi Program Pengembangan Fungsi Kartu Identitas Anak di Kota Sibolga)

rekreasi; sektor perbankan; restoran; kafe; dan pusat jajanan kuliner yang ada di Kota Sibolga.

2. Studi kelayakan kemitraan

Studi kelayakan diperlukan untuk mengkaji secara dalam dan terperinci terhadap isi kesepakatan dalam dokumen perjanjian termasuk rincian anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan dalam kemitraan yang dituangkan dalam dokumen perjanjian.

3. Seleksi kelayakan kemitraan

Setelah terpilih mitra yang akan bekerja sama, maka selanjutnya para pihak yang bekerja sama melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai wujud komitmen kerja sama.

4. Finalisasi atau implementasi kemitraan

Langkah terakhir adalah melakukan finalisasi atau implementasi kemitraan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Tahapan implementasi ini biasanya diikuti dengan melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai apakah kemitraan dapat dilanjutkan atau tidak.

5. *Goals (tujuan)*

Dimensi *Goals* merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan KIA, sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA meliputi peningkatan pendataan anak; peningkatan pelayanan publik; dan perlindungan anak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan KIA di Kota Sibolga menurut teori Merilee S. Grindel, bahwa implementor KIA telah menjalankan tugas dan berkomitmen untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Namun ditinjau dari keberhasilan implementasi kebijakan, pengembangan fungsi KIA belum berdampak atau berefek luas kepada kelompok sasaran kebijakan karena dimensi jenis manfaat dari kebijakan KIA tersebut belum banyak dirasakan oleh masyarakat. KIA belum begitu luas digunakan dalam pelayanan publik, sehingga belum terlihat perubahan yang terjadi terhadap peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak anak. Demikian juga respon dari masyarakat dan para penyelenggara pelayanan publik terhadap kebijakan KIA juga masih tergolong lemah. Untuk mengoptimalkan implementasi program pengembangan fungsi KIA di Kota Sibolga, direkomendasikan Model RING (Resources, Innovation, Network interaction, and Goals) Implementasi Program Pengembangan Fungsi KIA di Kota Sibolga sebagai hasil elaborasi dari dimensi-dimensi yang berpengaruh pada implementasi kebijakan KIA di Kota Sibolga.

BIBLIOGRAFI

- Arkanuddin, M. F., & Broto, M. F. (2023). The Role of Government Policy Toward Technology Continuance Intention on Digital Industry in Indonesia. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 5(3), 181–198.
- Asriana, A., & Susanti, S. (2022). Collaborative Government in Implementing the SALUR Application Program in Indonesia During the Covid-19 Pandemic. *KnE Social Sciences*, 176–189.
- Ayanlia, Y. P. (2014). Implementation of the Child Identity Card (KIA) Policy in Kutai Barat Regency. *International Research Journal of Economics and Management Studies IRJEMS*, 3(1).
- ESCAP, U. N. (2011). *A guidebook on public-private partnership in infrastructure*.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*.

- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi*. Ghalia Indonesia.
- Hamidah, N. P., & Nazriah, A. (2023). Exploring The Societal And Legal Impacts Of Child Identity Card Regulations: Lessons From Recent Implementation. *Public Policy Journal*, 4(2), 130–142.
- Malo, H. A. I., Ruja, I. N., & Perguna, L. A. (2022). Makna Simbolik dalam Tradisi Gerep Ruha di Desa Tenda. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(2), 208–219. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.53775>
- Muluk, K. (2008). *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Noer, K. U. (2021). Asesmen Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 1773.
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Purnomo, J. (2022). Vertical Collaborative Governance in Corporate University Implementation at a Regional Tax Office. *KnE Social Sciences*, 1392–1409.
- Riana, Z., Tannady, H., Diawati, P., Bambang, B., & Suhardi, D. (2023). Analisis Pengaruh Diferensiasi Produk, Service Quality Dan Harga Terhadap Minat Beli Produk Makanan Berbasis Ayam Olahan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(1), 547–554.
- Septa, G. (2023). Quality Of Services In Making Child Identity Card At The Department Of Population And Civil Registration. *Awang Long Law Review*, 5(2), 481–485.
- Setyawan, D. W., Djohan, D., Ilham, M., & Maryani, D. (2024). Implementation Of The Child Identity Card Policy In Serang District, Banten Province. *Journal of Social Science (JoSS)*, 3(6), 1480–1491.
- Syaprianto, S. (2023). Child Identity Card (Kia) Policy Implementation In The Population And Civil Registration Office Kuantan Singingi Regency. *Jurnal Kajian Pemerintahan Journal of Government, Social and Politics*, 9(1), 54–61.
- Tumbel, G. H., Siwij, D. S. R., Rantung, M. I. R., Polii, E. H., & Mokodompit, F. (2023). Implementation of Child Identity Card (KIA) policy in the population and civil registration service of Bolaang Mongondow Timur Regency. *Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)*, 1985–1993.
- Ulum, M. N., & Astrika, L. (2019). Strategi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(03), 231–240.
- Wijaya, H. (2018). Analisis data kualitatif model Spradley (etnografi). *Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, 3(1), 1–10.

Copyright holder:

Ismar Rosidi, Warjio, Susanti (2025)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

